

Diplomasi *Two-State Solution* dan Jaminan Keamanan Israel: Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presiden Prabowo Subianto (Oktober 2024 – Desember 2025)

Golda Naya Puri¹.

¹Universitas Paramadina.

E-mail: golda.naya@students.paramadina.ac.id (CA)

Abstrak: Artikel ini adalah kajian literatur (*literature review*) yang secara sistematis memetakan, menganalisis, dan mensintesis literatur yang ada mengenai arah diplomasi Indonesia terkait solusi dua negara (*two-state solution*) dalam konflik Israel-Palestina pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dibatasi sejak pelantikannya pada Oktober 2024 hingga sebelum penandatanganan Piagam *Board of Peace* (BoP) pada 22 Januari 2026. Kajian ini tidak menghasilkan data primer, melainkan mensintesis debat akademis dan kebijakan yang telah ada untuk mengidentifikasi pola, pertentangan, dan gap atau kesenjangan dalam literatur. Menggunakan tiga kerangka teoritis secara integratif: (1) konstruktivisme (Wendt; Finnemore) untuk menganalisis bagaimana identitas dan norma membentuk kebijakan luar negeri Indonesia; (2) konsep *norm entrepreneur* dan *norm life cycle* (Finnemore & Sikkink) untuk memetakan peran Indonesia dalam proses difusi norma *two-state solution* di level internasional; serta (3) teori *two-level game-intermestic* (Putnam; Manning) untuk menguraikan tekanan ganda domestik-internasional yang mempengaruhi formulasi kebijakan. *Review* literatur menunjukkan tiga temuan utama: pertama, di bawah Prabowo terjadi pergeseran dari *norm entrepreneurship* berbasis legitimasi moral menuju engaged pragmatism keterlibatan aktif berbasis kalkulasi strategis. Kedua, win-set domestik Indonesia menyempit ketika pemerintah menempuh pendekatan yang lebih pragmatis dan ketiga, keputusan bergabung dengan BoP merepresentasikan titik kritis di mana tekanan intermestic mencapai puncaknya, menandai pergeseran kualitatif dalam bentuk diplomatik Indonesia yang menjadi batas penelitian ini.

Kata Kunci: *Two-State Solution*, Konstruktivisme, *Norm Entrepreneur*, *Norm Life Cycle*, *Two-Level Game*, Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Palestina, Jaminan Keamanan Israel.

Sitasi: Puri, G. N. (2026). Diplomasi Two-State Solution dan Jaminan Keamanan Israel: Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presiden Prabowo Subianto. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(7), 944–961. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i7.1138>

1. Pendahuluan

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu isu geopolitik paling rumit dan berkepanjangan di dunia, dengan eskalasi signifikan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan memicu respons militer Israel di Gaza. Hingga akhir 2025, korban jiwa Palestina mencapai lebih dari 69.000

orang menurut data Kementerian Kesehatan Gaza dan PBB, disertai kehancuran 81 persen infrastruktur Gaza akibat blokade dan operasi militer. Two-state solution / Solusi dua negara berdasarkan garis 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina tetap menjadi kerangka utama perdamaian internasional, meski tantangan seperti pemukiman Israel dan keamanan menjadi hambatan.

Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar dengan komitmen konstitusional mendukung kemerdekaan Palestina (Pembukaan UUD 1945 ayat 5), secara konsisten menganut prinsip bebas-aktif dalam politik luar negeri. Pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 menandai era baru, di mana ia segera menegaskan dukungan penuh terhadap Palestina dalam pidato perdananya.

Pada September 2025, Prabowo aktif di forum PBB, mempromosikan two-state solution sebagai "satu-satunya jalan perdamaian abadi" sambil menekankan jaminan keamanan Israel melalui pengakuan timbal balik dan demiliterisasi Palestina. Pendekatan ini mencerminkan diplomasi presidensial yang assertif, di mana Prabowo bertindak sebagai norm entrepreneur untuk norma perdamaian inklusif.

Kebijakan ini relevan di tengah dinamika global: dukungan AS di bawah Presiden Trump untuk normalisasi, eskalasi regional (Hizbullah, Houthi), dan krisis kemanusiaan Gaza. Namun, Indonesia belum punya relasi diplomatik formal dengan Israel, menjadikan posisi Prabowo sebagai ujian prinsip bebas-aktif. Penelitian ini penting untuk memahami transformasi kebijakan luar negeri Indonesia pasca-Jokowi.

Sejak deklarasi kemerdekaan Israel tahun 1948 hingga saat ini, upaya perdamaian terus dilakukan, namun belum mencapai resolusi final yang diterima kedua belah pihak. Two State Solution (TSS) atau solusi dua negara telah menjadi kerangka utama yang disepakati secara internasional, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). TSS menawarkan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di samping Israel dengan perbatasan sebelum 1967 serta Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Indonesia secara historis merupakan salah satu pendukung paling vokal bagi kemerdekaan Palestina. Secara konstitusional, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, yang menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten menentang pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Indonesia juga secara resmi tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, sebuah sikap yang dipertahankan sejak era Presiden Soekarno hingga pemerintahan Joko Widodo.

Namun, dinamika geopolitik Timur Tengah telah berubah secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Normalisasi hubungan antara Israel dengan sejumlah negara Arab dan Muslim seperti Uni Emirat Arab (2020), Bahrain (2020), Sudan (2020), dan Maroko (2020) melalui Abraham Accords telah menggeser peta koalisi politik di kawasan. Negara-negara yang sebelumnya secara ideologis menolak pengakuan terhadap Israel mulai membuka hubungan diplomatik, ekonomi, dan keamanan secara terbuka. Fenomena ini menimbulkan tekanan baru terhadap negara-negara Muslim lainnya, termasuk Indonesia, untuk mempertimbangkan ulang posisi tradisional mereka.

Di tengah perubahan tersebut, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto (periode 2024–2029) menghadapi tantangan besar. Di satu sisi, Prabowo dikenal sebagai tokoh nasional dengan komitmen kuat terhadap kemerdekaan Palestina, yang kerap disuarakan dalam berbagai forum internasional. Di sisi lain, ia juga dikenal sebagai pragmatis yang memiliki jaringan luas dengan aktor-aktor global, termasuk negara-negara yang dekat dengan Israel, seperti Amerika Serikat dan Singapura. Dalam kampanyenya, Prabowo pernah menyatakan keinginan untuk menjadi "jembatan perdamaian" antara Israel dan Palestina, sebuah pernyataan yang kontroversial namun mengindikasikan kemungkinan perubahan pendekatan diplomasi Indonesia.

Salah satu isu paling sensitif yang muncul dalam diskursus kebijakan luar negeri Indonesia adalah soal jaminan keamanan Israel. Istilah ini merujuk pada komitmen, baik secara lisan, tertulis, maupun implisit, dari Indonesia untuk tidak melakukan tindakan yang membahayakan keamanan Israel. Jaminan tersebut bisa berupa tidak mendukung kelompok bersenjata Palestina, tidak mengizinkan aktivitas anti-Israel di wilayah Indonesia, atau memberikan kerja sama intelijen secara diam-diam. Meskipun belum pernah diakui secara resmi, wacana tentang jaminan keamanan sebagai entry point untuk membuka dialog tidak langsung dengan Israel mulai mengemuka di kalangan elit kebijakan luar negeri Indonesia.

Indonesia secara tradisional menolak hubungan diplomatik dengan Israel dan memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Posisi ini telah dipegang teguh sejak Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung. Namun, periode 2024-2025 menandai pergeseran signifikan dalam diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun tetap konsisten mendorong *two-state solution* (TSS) sebagai jalan keluar utama, pemerintahan Prabowo memperkenalkan narasi baru: kesediaan Indonesia untuk mengakui Israel dan menjamin keamanannya, dengan syarat Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Artikel ini bertujuan mengulas arah kebijakan Indonesia dalam periode tersebut dengan menggunakan kerangka teoritis *konstruktivisme*, *two-level game intermestic*, *norm entrepreneur*, dan *norm life cycle*.

Ketika Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, dunia internasional menyaksikan dimulainya era kebijakan luar negeri yang secara retorika tetap berkomitmen pada prinsip bebas dan aktif, namun secara praktis menunjukkan pergeseran orientasi yang signifikan. Tidak ada satu pun bidang kebijakan yang merefleksikan pergeseran tersebut sejelas isu Israel-Palestina.

Dalam kurun waktu kurang dari lima belas bulan sejak pelantikannya, yakni hingga sesaat sebelum Indonesia menandatangani Piagam *Board of Peace* di Davos pada 22 Januari 2026 kebijakan luar negeri Prabowo terhadap konflik Israel-Palestina mengalami transformasi yang oleh sebagian analis disebut sebagai pergeseran paradigmatis, sementara sebagian yang lain menilainya sebagai kelanjutan wajar dari posisi Indonesia yang telah lama dianut utamanya pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Inti dari perubahan tersebut terletak pada cara Prabowo merumuskan dan menyampaikan posisi Indonesia terhadap *two-state solution*. Secara substantif, Indonesia di bawah Prabowo tetap mendukung kemerdekaan Palestina sebagai syarat mutlak perdamaian. Namun secara operasional, Prabowo memperkenalkan dimensi baru yakni kesediaan eksplisit untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik apabila Israel terlebih dahulu mengakui negara Palestina yang merdeka. Ini merupakan sebuah formulasi bersyarat yang sebelumnya nyaris tidak pernah lontarkan secara terbuka oleh pemimpin Indonesia manapun. Pernyataan ini pertama kali disampaikan dalam konferensi pers bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka (28 Mei 2025), kemudian diulang dan diperkuat dalam pidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-80 (23 September 2025).

Pergeseran ini memancing respons yang beragam dan sering kali saling bertentangan dalam literatur akademis dan media. Sebagian menyebut langkah kesediaan mengakui Israel sebagai kedewasaan diplomatik, namun banyak yang mengkritika sebagai bentuk pertentangan terhadap prinsip konstitusional. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan yang lebih dalam antara dua logika yang sama-sama hadir dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Logika normatif dan idealis yang bersumber dari identitas Indonesia sebagai negara antikolonial dan anti penjajahan. Di sisi lain logika pragmatis strategis yang menuntut keterlibatan aktif dalam kekuasaan global.

Kajian literatur ini dimaksudkan untuk memetakan dan mensintesis perdebatan tersebut secara sistematis. Pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah bagaimana literatur yang ada menggambarkan dan menjelaskan perubahan arah kebijakan diplomasi Indonesia terkait *two-state solution* dan jaminan keamanan Israel pada era Prabowo (Oktober 2024 - Desember 2025)? Di mana terdapat konsensus dalam literatur, di mana letak pertentangan, dan apa saja kesenjangan yang belum terjawab?

Batas waktu penelitian ditetapkan sebelum bergabungnya Indonesia dengan *Board of Peace* (BoP) karena peristiwa tersebut menandai pergeseran kualitatif yang cukup mendasar sehingga memerlukan kajian tersendiri.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review* dengan pendekatan kualitatif interpretatif. Berbeda dengan tinjauan pustaka biasa yang hanya merangkum sumber, *systematic literature review* dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, evaluasi kritis, dan sintesis literatur yang dapat direplikasi. Tujuan metode ini bukan untuk menghasilkan data baru dari lapangan, melainkan menghasilkan pengetahuan baru melalui analisis dan sintesis kritis terhadap literatur yang telah ada. Kriteria literatur yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber yang memiliki relevansi langsung dengan topik kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina dan/atau memuat konsep *two-state solution*. Kriteria berikutnya adalah literatur yang membahas dinamika kebijakan sejak Oktober 2024 hingga Desember 2025, serta karya atau tulisan teoretis yang menjadi landasan analisis. Selain itu, sumber yang digunakan meliputi jurnal akademik terindeks, buku ilmiah, dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga riset, serta analisis akademik yang diterbitkan melalui media terkait yang kompeten. Sintesis literatur dilakukan melalui analisis teoretis untuk membangun kerangka interpretasi, pemetaan literatur substantif guna mengidentifikasi pola, konsensus, dan pertentangan, serta evaluasi kritis untuk menemukan kesenjangan (*gap*) yang belum terjawab dalam literatur yang ada.

3. Hasil & Pembahasan

Dinamika ini tampak dalam respons pemerintah terhadap berbagai kontroversi. Meskipun Prabowo menyatakan kesediaan mengakui Israel dengan syarat, Kementerian Luar Negeri Indonesia tetap menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan setiap langkah diplomatik tetap berlandaskan pada komitmen lama untuk memperjuangkan pengakuan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Putnam membangun kerangka *two-level game* untuk menjelaskan bahwa para pemimpin negara tidak bernegosiasi hanya di satu arena, melainkan secara simultan di dua arena yang saling bergantung (Putnam, Robert D., 1988). Level 1, negosiasi antarpemerintah di tingkat internasional dan pada level II yakni pencarian ratifikasi formal atau informal dari konstituen domestik. Konsep kunci dalam kerangka ini adalah *win-set* himpunan seluruh kemungkinan kesepakatan di Level I yang dapat diterima oleh konstituen Level II. Semakin besar *win-set*, semakin luas ruang manuver seorang pemimpin di Level I, semakin sempit maka semakin terbatas pilihannya.

Bayless Manning memperkenalkan konsep *intermestic* (gabungan *international* dan *domestic*) untuk merujuk pada isu-isu yang secara inheren bersifat lintas batas antara domestik dan internasional (Manning, Bayless., 1977). James Rosenau sebelumnya telah mengkonseptualisasikan fenomena serupa sebagai *linkage politics* yakni keterkaitan struktural antara peristiwa domestik dan internasional yang tidak dapat dianalisis secara terpisah (Rosenau, James N, 1966). Isu Palestina dalam kebijakan luar negeri Indonesia adalah contoh sempurna dari isu *intermestic*: ia sekaligus merupakan isu domestik (terkait dengan identitas keislaman, opini publik, dan legitimasi politik) dan isu internasional (terkait dengan posisi Indonesia dalam tata kelola global dan hubungan bilateral).

Kerangka *intermestic* ini diperkuat oleh kemampuan Putnam untuk menjelaskan paradoks yang sering muncul dalam diplomasi: bahwa seorang pemimpin terkadang justru membutuhkan *win-set* yang sempit untuk memperkuat posisi tawarnya di Level I karena sempitnya *win-set* mengirimkan sinyal yang kredibel kepada mitra negosiasi bahwa pemimpin tersebut tidak memiliki ruang untuk berkompromi lebih jauh. Ini menjelaskan mengapa tekanan domestik yang sangat kuat di Indonesia justru terkadang berfungsi sebagai aset diplomatik, bukan sekadar hambatan.

Bagan Kerangka Pemikiran

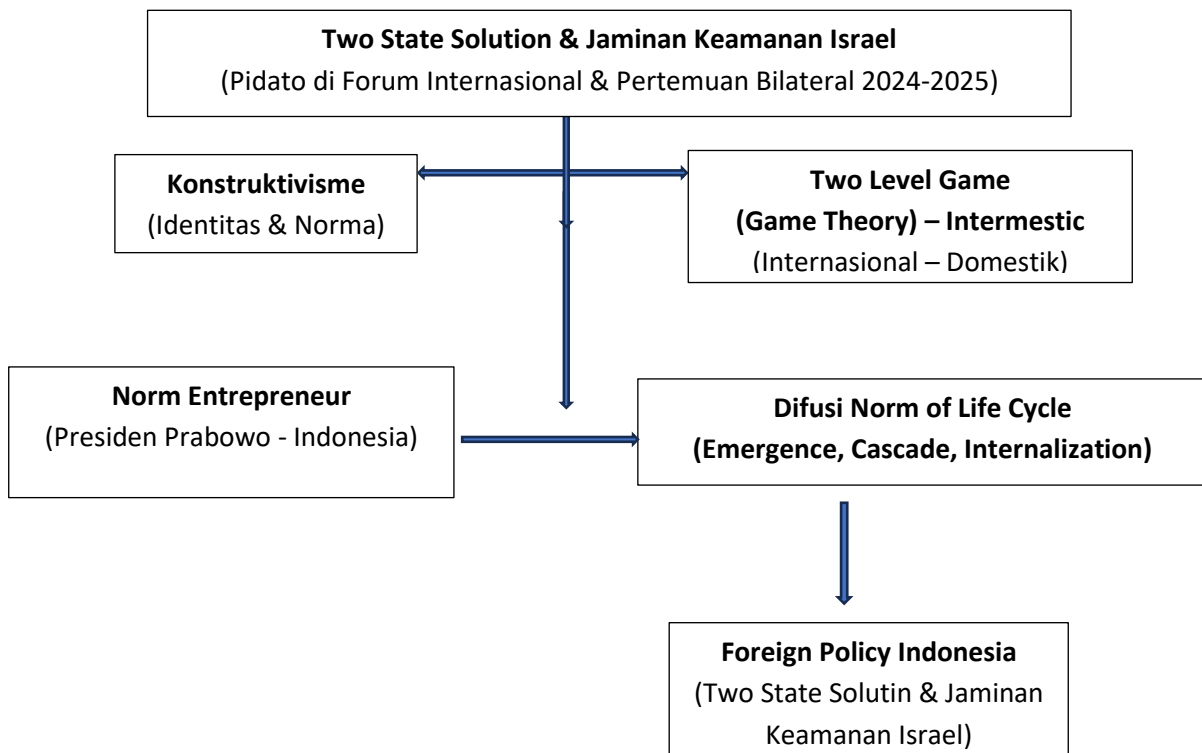


Diagram di atas menunjukkan bahwa pidato dalam forum berfungsi sebagai titik awal dalam proses konstruksi norma internasional. Melalui narasi diplomasi, Indonesia berperan sebagai *norm entrepreneur* yang mendorong legitimasi *Two-State Solution*. Proses ini berlangsung melalui tahapan *norm emergence*, *norm cascade*, dan *norm internalization*, yang pada akhirnya diharapkan menghasilkan penerimaan global terhadap solusi dua negara sebagai norma yang sah dalam penyelesaian konflik Palestina - Israel.

Bagian ini merupakan kajian literatur, di mana literatur yang teridentifikasi dianalisis secara komparatif dan disintesis untuk menemukan pola, konsensus, pertentangan, dan kesenjangan. Sintesis melalui tiga dimensi kerangka teoritis yang telah dibangun: 1. Konstruksi identitas normatif Indonesia dan posisi dalam *norm life cycle*; 2. peran presiden Prabowo sebagai *norm entrepreneur* dan pergeserannya, serta 3. dinamika *two-level game intermestic* yang membentuk pilihan-pilihan kebijakan.

Sejak awal masa jabatannya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto aktif mendorong penyelesaian konflik Gaza dan mendukung penuh kedaulatan Palestina. Sebelum menjabat sebagai presiden, saat masih menjadi Menteri Pertahanan dalam Forum IISS Shangri-La Dialogue 2024 di Singapura (1 Juni 2024), Prabowo telah menegaskan komitmen Indonesia membantu rakyat Gaza secara konkrit, termasuk kesiapan mengevakuasi hingga 1.000 warga Palestina yang terluka serta mengirimkan tenaga medis dan rumah sakit lapangan.

Pada 11 Juni 2024, Prabowo menghadiri KTT "*Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza*" di Amman, Yordania, di mana ia menegaskan: "Hanya dengan solusi dua negara, Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan secara aman dan tenteram. Setelah dilantik sebagai presiden, Prabowo melanjutkan diplomasi internasional dengan bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi pada Desember 2024 untuk memperkuat dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan implementasi TSS (presiden.go.id, 2025).

Presiden Prabowo Subianto tercatat aktif dan konsisten menyuarakan dukungan Norma *Two State Solution* dalam sejumlah pertemuan bilateral, pertemuan diplomatik, konferensi ataupun di forum internasional lainnya. Beberapa diantaranya:

1. High-Level International Conference on Palestine and the Two-State Solution PBB, New York (22 September 2025) (Subianto Prabowo, 2025b). Forum resmi tingkat tinggi di markas United Nations mengenai implementasi Two-State Solution untuk Palestina. Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, pentingnya implementasi Two-State Solution dan jaminan keamanan bagi Israel sebagai bagian dari perdamaian permanen. Forum ini dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, serta Indonesia masuk dalam core group pendukung implementasi solusi dua negara.

2. Sidang Majelis Umum PBB / UN General Assembly (UNGA) 2025 di New York (23 September 2025) (Sekretariat Kabinet RI, 2025). Dalam rangkaian sidang United Nations General Assembly 2025, Prabowo kembali menekankan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan damai, Palestina harus Merdeka serta keamanan Israel juga harus dijamin. Pidato ini mendapat perhatian internasional karena Prabowo juga membuka kemungkinan hubungan diplomatik Indonesia - Israel apabila Palestina telah diakui merdeka.
3. Pertemuan Bilateral Indonesia Prancis bersama Emmanuel Macron di Jakarta (28 Mei 2025). Dalam kunjungan resmi Emmanuel Macron ke Indonesia, Prabowo secara terbuka menyatakan Indonesia hanya memandang penyelesaian melalui Two-State Solution. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia siap mengakui Israel apabila Palestina memperoleh kemerdekaan penuh (Subianto Prabowo, 2025a).
4. Pertemuan Bilateral Indonesia - Turki bersama Recep Tayyip Erdogan di Bogor (12 Februari 2025). Dalam pertemuan resmi dengan Recep Tayyip Erdogan, kedua pemimpin menyatakan kesamaan pandangan bahwa kemerdekaan Palestina harus diwujudkan, solusi dua negara merupakan jalan penyelesaian konflik Palestina-Israel. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers bilateral Indonesia-Turki.
5. Diplomasi Timur Tengah dan Pernyataan Internasional soal Gaza (April 2025). Dalam rangkaian kunjungan ke Timur Tengah terkait krisis Gaza, Prabowo kembali menegaskan posisi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina, mendukung Two-State Solution sebagai dasar stabilitas kawasan. Pernyataan ini muncul dalam konteks diplomasi kemanusiaan Indonesia terkait Gaza.
6. Pernyataan bersama Malaysia di Jakarta (27 Juni 2025). Dalam pertemuan dengan Anwar Ibrahim, Prabowo menegaskan kembali bahwa Indonesia terus mendukung Palestina, Two-State Solution adalah satu-satunya cara mengakhiri konflik secara permanen.

Dari sejumlah pertemuan tersebut terbentuk pola Diplomasi Prabowo terkait Two-State Solution secara umum. Dalam diplomasi Prabowo konsistensi normatif Indonesia dengan melanjutkan garis diplomasi Indonesia yang sejak lama mendukung Palestina dan solusi dua negara. Pendekatan yang lebih pragmatis dengan mulai mengaitkan kemerdekaan Palestina, keamanan Israel, serta kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik. Internasionalisasi isu Palestina tidak hanya di forum Islam, tetapi juga forum PBB, diplomasi Eropa, forum bilateral strategis.

Prabowo juga menjaga posisi Indonesia sebagai middle power diplomatik. Dan menjadikan Indonesia berusaha tampil sebagai aktor moderat yang dapat diterima berbagai pihak. Posisi Diplomasi Prabowo secara konsisten sejak disumpah menjadi presiden, membawa sejumlah formula diplomatik. Palestina harus merdeka dan diakui. Israel juga harus diakui hak eksistensinya, Keamanan Israel harus dijamin, Indonesia

dapat membuka hubungan diplomatik dengan Israel bila Palestina Merdeka dan Two-State Solution menjadi satu-satunya jalan damai permanen (BPPI Setpres, 2025).

Pergeseran signifikan terjadi pada 28 Mei 2025, ketika Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap mengakui Israel dan menjalin hubungan diplomatik jika Israel terlebih dahulu mengakui negara Palestina yang merdeka. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Jakarta. Puncak dari pergeseran narasi ini terjadi pada Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, 23 September 2025. Dalam pidatonya di hadapan para pemimpin dunia, Prabowo menegaskan (Subianto Prabowo, 2025b): "Kita harus memperjuangkan negara Palestina, tapi kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keamanan Israel. Dengan hanya itu kita bisa mencapai perdamaian sesungguhnya, tidak lagi rasa kebencian, tidak lagi rasa saling curiga. Solusi satu-satunya adalah solusi dua negara".

Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, "Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan keamanan Israel" (youtube prabowo, 2025). Ia juga menyatakan kesiapan Indonesia mengirimkan 20.000 pasukan penjaga perdamaian di bawah mandat PBB. Pernyataan ini mendapat pujian dari media Israel, termasuk The Times of Israel dan The Jerusalem Post.

Namun, pergeseran ini tidak luput dari kritik tajam. Pengamat sosial-politik Muhammad Reza Al Habsyi menilai bahwa pidato Prabowo menandai pergeseran besar dari sikap tradisional Indonesia. Ia menyatakan: "Selama ini, Indonesia berdiri di garis depan menolak penjajahan Israel, menolak okupasi, dan menolak normalisasi. Kini, dengan menyisipkan frasa 'menjamin keamanan Israel', pesan itu seolah bergeser: korban dan pelaku diletakkan sejajar, seperti dua sisi mata uang yang sama" (Muhammad Reza Al Habsyi, 2025).

Pernyataan Prabowo pada 28 Mei 2025, menilai bahwa pernyataan tersebut bertolak belakang dengan prinsip keadilan dan solidaritas kemanusiaan, serta mencederai sikap resmi pemerintah Indonesia sebelumnya yang mendukung kemerdekaan penuh Palestina sebagai hak yang tidak dapat ditawar. Pidato dianggap Prabowo di PBB tidak sejalan dengan kebijakan Indonesia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengecam rencana pengiriman 20.000 pasukan Indonesia ke Gaza sebagai misi perdamaian, serta menilai Prabowo masih melakukan standar ganda dalam urusan hak asasi manusia (amnesty kemanusiaan, 2026). Akademisi Universitas Airlangga juga mengkritik bahwa wacana pengakuan terhadap Israel tidak sejalan dengan Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan (Palermo Julianus, 2025). "Kenapa tidak menggunakan cara-cara itu untuk

melakukan pressing terhadap negara-negara yang ada di PBB. Dalam beberapa waktu terakhir negara-negara maju seperti Australia, Inggris, Selandia Baru, dan mungkin beberapa negara persemakmurnannya lainnya akan satu persatu mendukung dan mengakui Palestina."

Meskipun banyak penelitian yang membahas posisi Indonesia terhadap Palestina, mayoritas studi berfokus pada era pemerintahan sebelumnya (SBY dan Jokowi) yang lebih menekankan pada bantuan kemanusiaan dan dukungan keanggotaan Palestina di PBB. Hal ini dikarenakan Pidato Two State Solution Prabowo di SMU PBB baru berlangsung pada September 2025. Sehingga Penelitian Sebelumnya hanya mentikberatkan pada keikutsertaan Indonesia sebagai anggota OKI dalam mendorong kemerdekaan Palestina.

Mayoritas secara khusus Pidato Presiden Prabowo pada UNGA ke 80 di New York, dalam level jurnal akademis belum terdapat kajian mendalam mengenai konten atau isi pidato yang menekankan *two state solution* sebagai gaya diplomasi spesifik Presiden Prabowo. Penelitian terdahulu mengenai konflik Palestina - Israel umumnya berfokus pada aspek geopolitik, hukum internasional, negosiasi perdamaian, serta peran aktor-aktor besar seperti Amerika Serikat juga Uni Eropa. Sementara itu, kajian mengenai diplomasi Indonesia terhadap isu Palestina lebih banyak menyoroti kebijakan luar negeri secara umum atau peran Indonesia dalam forum multilateral.

Selain itu penelitian lain juga berfokus pada literatur diplomasi Indonesia-Palestina didominasi era Jokowi, tentang multilateralisme dan bantuan humaniter tanpa rhetorical analysis mendalam. Ataupun dari pidato Jokowi tahun 2018 yang hanya bersifat deskriptif ("two state solution satu-satunya cara") tanpa framing konstruktivisme (Yunazwardi et al., 2025). Penelitian lain juga menekankan pada metodologis yakni studi kuantitatif content analysis (Santoso, 2022), yang mengabaikan discourse analysis kualitatif untuk elemen seperti "*two descendants of Abraham*" di pidato Prabowo ataupun integrasi konstruktivisme.

Keterbatasan lain analisis Pidato Prabowo pada UNGA tidak mencakup studi spesifik yang menyebut sidang majelis umum PBB ke-80 pada tahun 2025. Penelitian terdahulu juga masih terbatas dan belum secara spesifik menganalisis pidato kepala negara Indonesia di forum PBB sebagai praktik konstruksi norma dan identitas, khususnya dalam konteks dukungan terhadap *two-state solution dan jaminan keamanan Israel* (Robby Hadza Min Fadhl, 2025).

3.1. Konstruksi Identitas Normatif Indonesia dan Posisinya dalam *Norm Life Cycle*

Konsensus Literatur: Norma Dukungan Palestina sudah Terinternalisasi

Seluruh literatur yang dikaji baik yang bersifat analitis-akademis maupun yang bersifat kritis-advokasi menunjukkan konsensus yang kuat pada satu titik yakni dukungan terhadap kemerdekaan Palestina telah mencapai tahap *norm internalization* di level domestik Indonesia. Ia bukan lagi sekadar kebijakan yang dapat diubah melalui kalkulasi kepentingan, melainkan bagian integral dari identitas diplomatik Indonesia yang bersumber dari prinsip konstitusional (UUD 1945 alinea keempat) dan doktrin bebas dan aktif (Hatta).

Rizal Sukma menunjukkan bahwa sejak era presiden Sukarno, dukungan terhadap Palestina berfungsi sebagai penanda identitas yang membedakan Indonesia dalam percaturan global (Sukma, Rizal, 2003). Dukungan ini mencerminkan solidaritas dengan perjuangan anti-kolonialisme sekaligus memosisikan Indonesia sebagai pemimpin moral di dunia Islam.

Yuliantoro memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina telah menjadi *taken-for-granted* dalam formulasi kebijakan luar negeri Indonesia, sebuah ciri khas norma yang telah mencapai tahap internalisasi penuh (Yuliantoro, Nur Rachmat., 2020).

Relevansi dari konsensus ini adalah menjelaskan mengapa literatur yang mengkritisi pergeseran kebijakan Prabowo menggunakan argumen berbasis identitas dan konsistensi normatif, bukan hanya argumen kepentingan.

Dimanakah Posisi Indonesia dalam *Norm Life Cycle* di Level Internasional?

Titik pertentangan pertama dalam literatur muncul ketika para analis berbeda pendapat tentang di mana posisi norma *two-state solution* saat ini dalam siklus hidupnya di level internasional dan apa implikasi posisi itu bagi kebijakan Indonesia.

Satu kelompok literatur (New Mandala; bne IntelliNews; Modern Diplomacy) melihat bahwa norma *two-state solution* sedang mengalami *norm cascade* yang semakin menguat di level internasional, ditandai oleh gelombang pengakuan Palestina oleh Inggris, Australia, Perancis, dan sejumlah negara lainnya pada September 2025 (New Mandala, 2025). Dalam bacaan ini, kebijakan Prabowo termasuk pidato di United Nation General Assembly UNGA yang menyertakan tawaran pengakuan bersyarat terhadap Israel merupakan langkah *norm entrepreneurship* yang brilian. Indonesia memanfaatkan momentum *cascade* untuk memosisikan diri sebagai pemimpin yang mampu menjembatani kubu pendukung Palestina dengan kubu yang mempersyaratkan jaminan keamanan Israel.

Kelompok literatur lain (Kuttab, dikutip dalam Times of Israel; Middle East Monitor) berpendapat sebaliknya, norma *two-state solution* secara fundamental tidak lagi viable sebagai proyek politik konkret, meskipun masih kuat secara retorika (Kuttab, Jonathan,

2021). Kuttab berargumen bahwa perluasan permukiman Israel yang terus berlangsung di Tepi Barat telah secara struktural menghancurkan kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang viable atau layak. Dalam bacaan ini, seluruh advokasi *two-state solution* termasuk yang dilakukan Indonesia berisiko menjadi ritual retorika yang tidak lagi terhubung dengan realitas di lapangan.

Pertentangan ini memiliki implikasi besar bagi evaluasi terhadap peran Indonesia sebagai *norm entrepreneur*: apakah Indonesia sedang memimpin *cascade* dari norma yang masih relevan, atau apakah ia sedang mempertahankan semangat norma yang secara empiris telah mengalami *norm regression* di lapangan? Kesenjangan ini belum dijawab secara memadai oleh literatur yang ada.

3.2. Prabowo sebagai Norm Entrepreneur: Pergeseran Strategi dan Kontradiksinya

Konvergensi: Prabowo Memperkenalkan Dimensi Baru dalam Advokasi Indonesia

Hampir semua literatur yang dikaji baik yang positif maupun yang kritis terhadap Prabowo sepakat bahwa era Prabowo memperkenalkan setidaknya satu elemen *genuinely* baru dalam cara Indonesia mengadvokasi *two-state solution* yakni kesediaan eksplisit untuk membicarakan jaminan keamanan Israel sebagai bagian dari paket perdamaian.

Dalam pernyataan bersama Macron (28 Mei 2025), Prabowo menyatakan bahwa "*we must acknowledge and guarantee Israel's rights as a sovereign country that must be paid attention to and guaranteed safety*" (Subianto Prabowo, 2025a). Formulasi ini meskipun kemudian diklaim pemerintah sebagai sekadar parafrase dari posisi lama merupakan artikulasi yang lebih eksplisit tentang jaminan keamanan Israel dibandingkan apapun yang pernah disampaikan pemimpin Indonesia sebelumnya. bahwa ini bukan pernyataan baru dalam substansi, tetapi baru dalam artikulasi dan konteks penyampaiannya.

Dari perspektif *norm entrepreneurship*, pergeseran ini dapat dibaca sebagai upaya Prabowo untuk menggeser *frame resonance* dari advokasi Indonesia. Alih-alih sekadar memperjuangkan hak Palestina (yang telah menjadi norma lama), Prabowo mencoba memposisikan Indonesia sebagai aktor yang mampu memahami *legitimate security concerns* semua pihak. New Mandala mencatat bahwa strategi ini memberikan Prabowo keleluasaan yang lebih besar dengan kelompok-kelompok Islamis domestik dibandingkan yang dimiliki oleh para pendahulunya, justru karena kredibilitas militernya yang diakui oleh kalangan konservatif.

Divergensi: antara *Norm Entrepreneurship* dan *Engaged Pragmatism*

Titik penyebaran atau divergensi terbesar dalam literatur muncul dalam pertanyaan: Apakah apa yang dilakukan Prabowo masih dapat dikategorikan sebagai *norm entrepreneurship* (yaitu upaya mendorong norma yang diyakini demi kepentingan yang lebih luas), ataukah ia telah beralih ke mode *engaged pragmatism* (yaitu keterlibatan strategis yang dimotivasi terutama oleh kalkulasi kekuasaan dan kepentingan jangka pendek)?

Literatur yang condong melihat kontinuitas (LSE Blogs; Modern Diplomacy-Prabowo as Tough Guy) berargumen bahwa Prabowo melakukan *reinterpretasi kreatif* dari prinsip bebas aktif untuk konteks multipolar pasca 2025. Dalam bacaan ini, bergabung dengan Board of Peace BoP adalah contoh klasik *norm localization*. Indonesia tidak meninggalkan normanya, melainkan mencari platform baru yang lebih berpengaruh untuk mengartikulasikan norma tersebut. LSE Blogs mencatat bahwa Prabowo tampak mengoperasikan sebuah *free maneuver policy* yang bergerak di antara semua kutub kekuasaan tanpa terikat permanen pada salah satunya (Zulfikar., 2026).

3.3. Dinamika *Two-Level Game* - Intermestic

Literatur yang dianalisis secara konsisten menggambarkan bahwa *win-set* Level II (domestik) Indonesia bersifat sangat sempit dalam isu Palestina. Opini publik yang sangat pro-Palestina, diperkuat oleh tekanan dari ormas-ormas Islam besar, secara efektif membatasi ruang manuver pemerintah. New Mandala mencatat bahwa Prabowo menerima lebih banyak *leeway* (kebebasan untuk mengambil keputusan) dari kelompok Islamis untuk melakukan pergeseran tonal namun bukan karena *win-set* melebar, melainkan karena Prabowo memiliki kredibilitas personal dengan kelompok hardliner yang tidak dimiliki oleh pendahulunya.

Dimensi *intermestic* yang menarik muncul dari data perdagangan: nilai dagang Indonesia-Israel meningkat dari USD 187,7 juta (2023) menjadi USD 237,9 juta (2024) meskipun tidak ada hubungan diplomatik formal. Fakta ini yang hampir tidak pernah menjadi bahan debat publik domestik menunjukkan bahwa isu Palestina beroperasi secara *intermestic* dalam cara yang tidak simetri. keterlibatan ekonomi berlangsung diam-diam di level teknis-bisnis, sementara posisi normatif dipertahankan keras di level retorika publik. Kesenjangan antara keduanya belum dikaji secara sistematis dalam literatur yang ada.

Di Level I (internasional), literatur menggambarkan bahwa era Prabowo ditandai oleh pergeseran dari *multilateralisme normatif* (mendorong resolusi PBB, mengecam Israel di forum internasional) menuju *keterlibatan selektif-pragmatis* (bergabung dengan koalisi ad-hoc yang dipimpin AS, berpartisipasi aktif dalam Group of New York). Pergeseran ini konsisten dengan logika *reverberation* Putnam: Prabowo menggunakan

keterlibatan di Level I untuk mempengaruhi persepsi di Level II tentang pilihan-pilihan yang tersedia.

Modern Diplomacy (*Realistic Choice or Subtle Coercion*) menunjukkan bahwa keanggotaan BoP tidak sepenuhnya sukarela dalam arti substantif. Tekanan dari AS dalam konteks dependensi ekonomi Indonesia dan dinamika tarif menciptakan kondisi di mana Indonesia menghadapi pilihan antara bergabung dengan biaya besar atau berisiko menghadapi konsekuensi ekonomi yang tidak kalah besar. Ini adalah ilustrasi konkret dari apa yang Putnam sebut sebagai *involuntary defection pressure* di mana pemimpin terpaksa mengambil posisi tertentu bukan karena keyakinan, tetapi karena struktur - sanksi di Level I hanya meninggalkan sedikit alternatif pilihan.

Titik Kritis: Penandatanganan *Board of Peace* sebagai Batas Analitis

Penandatanganan Piagam BoP pada 22 Januari 2026 di Davos merupakan peristiwa yang oleh literatur secara konsisten diperlakukan sebagai *tipping point* sebuah peralihan. Tempo.co (tempo.co.id, 2026) melaporkan bahwa keputusan bergabung diambil dua hari sebelum penandatanganan, setelah konsultasi intensif dengan anggota Group of New York (Arab Saudi, UEA, Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, dan Mesir). Kecepatan pengambilan keputusan ini sendiri menjadi subyek kritik akademis: tidak ada proses parlementer, tidak ada konsultasi publik, dan tidak ada transparansi tentang syarat-syarat keanggotaan.

Dari perspektif *two-level game*, penandatanganan BoP merepresentasikan momen ketika Prabowo memilih untuk memperluas *win-set*-nya di Level internasional dengan cara yang berisiko mempersempit *win-set*-nya di Level domestik sebuah taruhan strategis yang premisnya adalah bahwa hasil konkret dari keterlibatan dalam BoP (akses ke proses perdamaian, hubungan dengan AS, keuntungan ekonomi) akan mengkompensasi biaya reputasional domestik. Apakah kalkulasi ini terbukti benar adalah pertanyaan yang berada di luar batas penelitian ini.

3.4. Pemetaan Kesenjangan dan Agenda Penelitian

Hambatan/ Kesenjangan yang Teridentifikasi

Sintesis literatur yang dilakukan mengidentifikasi setidaknya empat kesenjangan signifikan (Gap Research) yang belum dijawab secara memadai oleh literatur yang ada:

Pertama, kesenjangan empiris tentang proses pengambilan keputusan internal. Literatur yang ada sangat kaya dalam menganalisis *output* kebijakan (pernyataan publik, keputusan bergabung BoP), namun sangat miskin dalam menjelaskan *proses* pengambilan keputusan di balik layar. Bagaimana dinamika di dalam Kemlu RI dan Istana Presiden dalam merumuskan posisi Indonesia? Siapa aktor-aktor kunci yang berpengaruh dalam transisi dari pendekatan Menlu Retno Marsudi ke Sugiono?

Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan penelitian lapangan (wawancara, akses dokumen internal) yang belum dilakukan.

Kedua, kesenjangan analitis tentang efektivitas norm entrepreneurship Indonesia.

Literatur yang ada secara deskriptif menggambarkan upaya-upaya *norm entrepreneurship* Indonesia (pertemuan dengan Joe Biden, pidato di UNGA, lobbying di OKI, pernyataan bersama Macron), namun hampir tidak ada yang mengevaluasi *efektivitasnya* secara sistematis. Apakah advokasi Indonesia secara konkret mengubah perilaku negara-negara lain? Apakah *framing* yang digunakan Prabowo beresonansi dengan audiens yang dituju? Ini adalah pertanyaan empiris yang memerlukan metodologi yang lebih terstruktur.

Ketiga, kesenjangan komparatif. Tidak ada dalam literatur yang dikaji kajian komparatif sistematis antara pendekatan Indonesia dengan pendekatan negara-negara Muslim besar lainnya seperti Arab Saudi, Turki, ataupun Mesir yang juga bergabung dengan BoP. Perbandingan ini penting untuk menilai apakah apa yang dilakukan Prabowo merupakan fenomena spesifik-Indonesia atau bagian dari pola regional yang lebih luas.

Keempat, kesenjangan tentang persimpangan perdagangan-diplomatik. Fakta bahwa perdagangan Indonesia-Israel terus meningkat meskipun tidak ada hubungan diplomatik merupakan fenomena *intermestic* yang sangat menarik namun nyaris tidak dikaji secara serius dalam literatur. Bagaimana mekanisme perdagangan ini berlangsung? Siapa aktor-aktornya? Bagaimana dampaknya terhadap postur diplomatik Indonesia? Ini adalah gap empiris yang signifikan.

Agenda Penelitian Lanjutan

Berdasarkan pemetaan kesenjangan atau *Gap Research* di atas, beberapa agenda penelitian yang mendesak untuk dikembangkan adalah:

1. Studi proses kebijakan (*foreign policy process study*) berbasis wawancara dan analisis dokumen tentang pengambilan keputusan Indonesia terkait Pengakuan dan Jaminan Keamanan Israel.
2. Evaluasi efektivitas *norm entrepreneurship* Indonesia menggunakan kerangka *frame resonance analysis*.
3. Kajian komparatif tentang respon negara-negara Muslim kekuatan menengah terhadap inisiatif pengakuan Israel dan jaminan keamanan Israel.
4. Analisis mendalam tentang paradoks perdagangan-diplomasi Indonesia-Israel.

4. Penutup

Kajian literatur ini telah memetakan dan mensintesis debat akademis dan kebijakan tentang arah diplomasi Indonesia terkait *two-state solution* pada era Prabowo

Subianto. Alih-alih sekadar merangkum sumber-sumber yang ada, kajian ini berupaya menemukan pola, mengidentifikasi konsensus dan pertentangan, serta menunjukkan ke mana celah dalam literatur yang ada.

Melalui lensa konstruktivisme, ditemukan bahwa norma dukungan terhadap kemerdekaan Palestina telah mencapai tahap *internalisasi* penuh di level domestik Indonesia, sehingga setiap pergeseran sekecil apapun dalam substansi kebijakan yang diambil akan dipersepsi sebagai ancaman identitas oleh kelompok-kelompok yang menjadi penjaga norma tersebut. Inilah akar dari resistensi domestik yang kuat terhadap kebijakan Prabowo sebagai presiden Indonesia.

Melalui kerangka *norm entrepreneur* dan *norm life cycle*, ditemukan bahwa Prabowo melakukan pergeseran strategi *norm entrepreneurship*: dari advokasi normatif-konfrontatif menuju keterlibatan pragmatis-persuasif. Literatur terbagi dalam mengevaluasi pergeseran ini: sebagian melihatnya sebagai *norm localization* yang adaptif, sebagian yang lain melihatnya sebagai *norm regression* yang berbahaya.

Melalui kerangka *two-level game intermestic*, ditemukan bahwa Prabowo menghadapi *win-set* yang paradoks: sempit di Level II (domestik) namun menuntut keterlibatan yang semakin luas di Level I (internasional). Penandatanganan BoP pada 22 Januari 2026 merepresentasikan momen di mana Prabowo memilih untuk mengutamakan logika Level I dengan taruhan bahwa hasil konkret keterlibatan akan mengkompensasi biaya normatif domestik. Pertanyaan apakah taruhan ini terbukti benar merupakan agenda penelitian yang paling mendesak untuk kajian berikutnya.

Referensi

- Acharya, Amitav. (2004). *How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism*.
- amnesty kemanusiaan. (2026). *Pengiriman pasukan RI ke Gaza misi berbahaya*. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/pengiriman-pasukan-ri-ke-gaza-misi-berbahaya/02/2026/>
- BPMI Setpres. (2025). *Presiden Prabowo Tegaskan Dukungan Indonesia pada Solusi Dua Negara di Sidang Umum PBB*. <https://presidenri.go.id/video/presiden-prabowo-tegaskan-dukungan-indonesia-untuk-solusi-dua-negara-di-pbb-new-york-23-sep-2025/>
- finnmore and sikkink. (1998). *International norm dynamic*. cambridge university press. <https://www.scribd.com/document/601277605/Finnmore-and-Sikkink-1998>
- Finnmore, Martha. (1996). *National Interests in International Society*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kuttab, Jonathan. (2021). *Beyond the Two-State Solution*. Bethlehem: Diyar Publisher.

- Manning, Bayless. (1977). *The Congress, the Executive and Intermestic Affairs: Three Proposals*.
- Muhammad Reza Al Habsyi. (2025). *Pidato Prabowo dan Ilusi Dua Negara: Menguji Konsistensi Indonesia dalam Isu Israel–Palestina*.
<https://www.tribunnews.com/tribunners/7733801/pidato-prabowo-dan-ilusi-dua-negara-menguji-konsistensi-indonesia-dalam-isu-israelpalestina>
- New Mandala. (2025). *Why Islamists Let Prabowo Shift on Israel*.
- Palermo Julianus. (2025). *Wacana Pengakuan Israel oleh Presiden Prabowo, Ini Respons Akademisi UNAIR*.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20250924/15/1914294/wacana-pengakuan-israel-oleh-presiden-prabowo-ini-respons-akademisi-unair>
- presiden.go.id. (2025). Presiden Prabowo Hadiri Konferensi Internasional di PBB terkait Palestina, Tegaskan Komitmen untuk Solusi Dua Negara. *Presiden.Go.Id*.
<https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-hadiri-konferensi-internasional-di-pbb-terkait-palestina-tegaskan-komitmen-untuk-solusi-dua-negara/>
- Putnam, Robert D. (1988). *Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games*.
- Risse, Thomas, Stephen C. Ropp, dan Kathryn Sikkink. (1999). *The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Robby Hadza Min Fadhli. (2025). *Mendobrak Tabu Solusi Satu Negara*.
<https://igss.uii.ac.id/mendobrak-tabu-solusi-satu-negara/>
- Rosenau, James N. (1966). "Pre-Theories and Theories of Foreign Policy." Dalam R. Barry Farrell (ed.), *Approaches in Comparative and International Politics*. Evanston: Northwestern University Press.
- Sekretariat Kabinet RI. (2025, September 24). *President Prabowo Subianto Calls for Two-State Solution and Urgent Gaza Aid at UNGA*. setkab.go.id
- Subianto Prabowo. (2025a). *Pernyataan Pers bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron, Istana Merdeka*.
- Subianto Prabowo. (2025b, September 22). *Pidato di Sidang Umum PBB ke-80 (UNGA 80) dan Konferensi Tingkat Tinggi Two-State Solution, New York*.
- Sukma, Rizal. (2003). *Islam in Indonesian Foreign Policy*. London: Routledge.
- tempo.co.id. (2026, January 24). *Indonesia Joins the Gaza Board of Peace: Key Facts*. Tempo.co.
- wendt. (1999). *Anarchy is what state make of it*.
https://www.academia.edu/4915419/Anarchy_is_what_States_Make_of_it_The_Social_Construction_of_Power_Politics_Author_s_Alexander_Wendt_Source_International

youtube prabowo. (2025). *Pidato Prabowo di sidang umum ke 8o PBB* [Video recording].
<https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=transkrip+pidato+prabowo+di+unga+new+york+september+2025&mid=93FB3290531F1AD064DB93FB3290531F1AD064DB&churl=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fchannel%2fUCOhcvIMiRI4KVfJWPkBwIBg&FORM=VIRE>

Yuliantoro, Nur Rachmat. (2020). *"Indonesia's Foreign Policy and the Palestinian Question."* Dalam Mehmet Ozay (ed.), *Southeast Asian Perspectives on the Middle East*.

Zulfikar. (2026, March 4). Prabowo's Foreign Policy: China, Russia, BRICS & US Signalling. *LSE Blogs – Centre for Finance and Finance*. blogs.lse.ac.uk.
